



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408833/2023**



DS:3601-1348-0306-0886

Revisi ke 04

Tanggal : 11 April 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker : (408833) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
- Sebesar : Rp. 2.426.682.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.426.682.000
Rp. 2.426.682.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.426.682.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 2.426.682.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408833/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3601-1348-0306-0886

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408833) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.426.682.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.426.682.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.AEA	Koordinasi	14,00	kegiatan	300.737.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	14,00	kegiatan	300.737.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.202.195.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.202.195.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	923.750.000
Rincian Output	:	01	BIC.001 Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	6,00	Lembaga	923.750.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

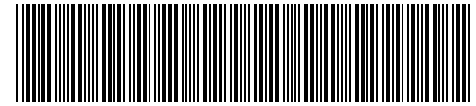
ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408833/2023

I B. SUMBER DANA



DS:3601-1348-0306-0886

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (408833) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	2.426.682.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	2.426.682.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408833/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3601-1348-0306-0886

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408833) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408833	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	-	2.426.682	-	-	-	2.426.682		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.426.682	-	-	-	2.426.682		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.426.682	-	-	-	2.426.682		
5251.AEA	Koordinasi (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	300.737	-	-	-	300.737	13 . 51	
04	PNBP	-	300.737	-	-	-	300.737	042	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.202.195	-	-	-	1.202.195	13 . 51	
04	PNBP	-	1.202.195	-	-	-	1.202.195	042	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	923.750	-	-	-	923.750	13 . 51	
04	PNBP	-	923.750	-	-	-	923.750	042	
JUMLAH		-	2.426.682	-	-	-	2.426.682		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408833/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3601-1348-0306-0886

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (408833) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

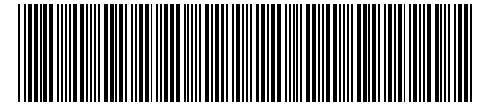
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408833	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	326.013	272.817	268.910	260.234	242.018	200.162	217.530	191.040	206.218	133.748	107.991	2.426.682
		BELANJA BARANG	0	326.013	272.817	268.910	260.234	242.018	200.162	217.530	191.040	206.218	133.748	107.991	2.426.682
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	326.013	272.817	268.910	260.234	242.018	200.162	217.530	191.040	206.218	133.748	107.991	2.426.682
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	326.013	272.817	268.910	260.234	242.018	200.162	217.530	191.040	206.218	133.748	107.991	2.426.682

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408833/2023
IV A. B L O K I R**



DS:3601-1348-0306-0886

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408833] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

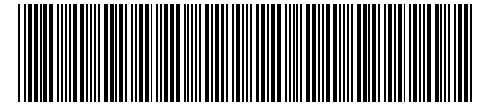
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408833/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:3601-1348-0306-0886

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [408833] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001